

**ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh :

**MARYA ELVIANA
NPM 1651010222**

Jurusan :Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh :

MARYA ELVIANA

NPM : 1651010222

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Madnasir, S.E., M.S.I

Pembimbing II : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara baik negara maju maupun negara berkembang namun lebih banyak terjadi di negara berkembang karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan *sustainable*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yaitu dengan meluncurkan berbagai instrument kebijakan dan melalui program-program nasional untuk pemberdayaan masyarakat, program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa, jumlah anggaran dana desa dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan.

Tujuan adanya penelitian ini yang *pertama* untuk mengetahui Bagaimana implementasi dana desadi desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dan Bagaimana implementasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersumber dari data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah skeretaris desa, Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Ketua Urusan (KaUr) dan masyarakat Desa Sukapadan dalam pemilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, untuk menganalisis data dengan metode deduktif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sudah dikatakan baik terbukti dalam pembangunan kantor kepala desa, polindes, TPA, madrasah, dan rabat beton 8 titik sedangkan dalam pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Desa sukapadang dalam pemanfaatan dana Desa secara umum belum dikatakan baik, dan belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa. Dan dalam Perspektif ekonomi islam mengenai dana desa terhadap tingkat kemiskinan di desa Sukapadang Kecamtan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus belum sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi islam yaitu keadilan, terkait permasalahan pada pengalokasian yang tidak sesuai peraturan pemerintah , pemerintah desa hanya mengalokasikan dananya sebagian besar hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk bidsng pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat masih sangat terbatas. Tanggung jawab, pemerintah desa belum mengalokasikan secara baik dan bertanggung jawab, berdasarkan implementasinya dana desa, pemerintah desa belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemasalahatan dalam kebijakan ini. Pemerintah desa masih belum tepat sasaran dalam mengalokasikan angrgan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Dana Desa, Mengentaskan Kemiskinan, Perspektif Ekonomi Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marya Elviana

NPM : 1651010222

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** Studi Pada: Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh BALak Kabupaten Tanggamus. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Maret 2020

Penulis,



Marya Elviana
NPM. 1651010222



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)
703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukapadang
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)
Nama : Marya Elviana
NPM : 1651010222
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Madnasir, S.E., M.Si.
NIP. 197504242002121001

Pembimbing II,

Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek
NIP. -

Mengetahui
Ketua Program Studi

Madnasir, S.E., M.Si
NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)” disusun oleh Marya Elviana, NPM. 1651010222 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 11 Mei 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Ahmad Isnaini, M.Ag

Sekretaris : Mohammad Fikri Nugraha Kholid, M.Pd

Penguji I : H. Syamsul Hilal, M.Ag

Penguji II : Madnasir, S.E., M.S.I

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 19800801 200312 1 001

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa’ ayat 58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai, yaitu:

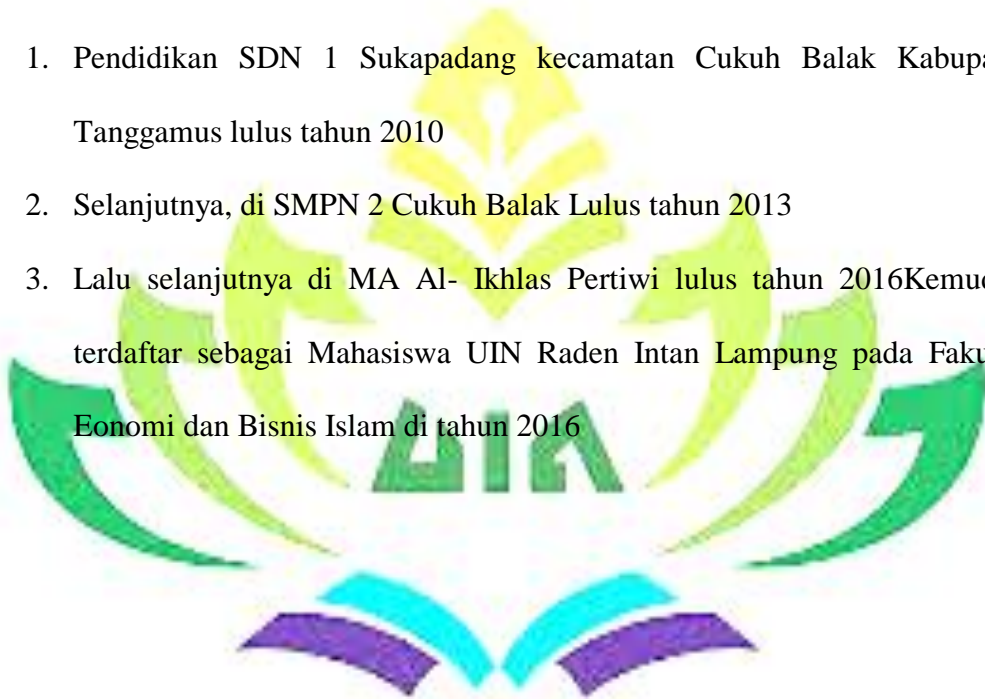
1. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Ahnuddin dan Ibunda Aminah yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis bisa menorehkan senyum rasa bangga ibu dan ayah.
2. Saudaraku, Nazrul Hazmi, Silya Hazdalina dan adik ku Nazron Aziz karena berkat do'a, dukungan dan semangat dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
3. Untuk sahabat terbaikku, Enis Apriyanti, Eka Nurjanah, Reni Widyaningsih, Indri Ade Ghusanty dan destania yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangatiku, terimakasih sahabatku.
4. Untuk teman sekaligus saudaraku Edwin Saputra dan Arbi Gunawan terimakasih banyak sudah memberikan semangat yang luar biasa.
5. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang Rabbani, UIN Raden Intan Lampung, Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas
6. Sahabat seperjuangan khususnya kelas C, Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.UIN Raden Intan Lampung semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dengan pancaran nilai-nilai Rabbani

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda yaitu Marya Elviana di lahirkan di desa sukapadang kecamatan cukuh balak kabupaten tanggamus, 10 Maret 1999. Putri ke tiga dari empat bersaudara atas pasangan Bapak Ahnuddin dan Ibu Aminah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan SDN 1 Sukapadang kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus lulus tahun 2010
2. Selanjutnya, di SMPN 2 Cukuh Balak Lulus tahun 2013
3. Lalu selanjutnya di MA Al- Ikhlas Pertiwi lulus tahun 2016Kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam di tahun 2016



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. sang pemilik dan pemberi cinta,yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulismampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan hampan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi inidisusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1)pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas NegeriRaden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak lain yang mendukungpenulisan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Bapak Dr.Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.

2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I dan Ibu Gustika Nurmalia, S.E., M.Ek selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.
5. Keluarga seperjuangan kelas Ekonomi Islam C angkatan 2016, atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menajalani suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Proud to be a part of you, tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan Rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 1 april 2020

Marya Elviana
NPM.1651010222

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan memilih judul	3
C. Latar belakang masalah	4
D. Rumusan masalah.....	10
E. Tujuan penelitian.....	11
F. Manfaat penelitian.....	11
G. Batasan masalah	12
H. Metode penelitian.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	19
1. Kemiskinan.....	19
2. Pengentasan Kemiskinan.....	31
3. Dana Desa	32
4. Alokasi Dana Desa	39
5. kemiskinan dalam Perspektik Ekonomi Islam	45
6. Ekonomi Islam	54
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	61
C. kerangka Berpikir	64

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian Pekon Sukapadang	66
1. Sejarah Berdirinya	66
2. Struktur Organisasi Pekon Sukapadang	70

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Pekon	71
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukapadang sebelum dan Sesudah Adanya Dana Desa	77

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Dana Desa di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.....	85
B. Implementasi Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dalam Perspektif Ekonomi Islam	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Turunan Penyimbang Adat Pekon Sukapadang.....	67
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	68
Tabel 3.3 Jumlah Karyawan.....	69
Tabel .3.4 Jumlah Penduduk lulus pendidikan umum	69
Tabel.3.5 Jumlah Penduduk Tidak Lulus dan Tidak Sekolah.....	70
Tabel 3.6 Dana Desa Yang di Terima di Desa Sukapadang Periode 2016-2019	78
Tabel 3.7 Data Pembangunan Infrastruktur Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2019	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Pekon Suka Padang Sumber: Sekretariat Pekon Sukapadang Tahun 2019.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk lebih memahami skripsi ini, serta mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah "Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Mengentaskan kemiskinan menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)." Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis

Aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah suatu untuk digolongkan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya.¹

2. Implementasi

Pengertian implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan.² Berdasarkan hal tersebut implementasi disini adalah upaya

¹Makinuddin, *Analisis Sosial* (Malang, 2006) h.40.

² Ebta Setiawan, diakses tanggal 30 november 2019 pukul 19:09 Wib

yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa sukpadang yang meliputi proses perencanaan atau pelaksanaan alokasi anggaran.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sendiri.⁴

5. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat dan prinsip-prinsip ke-islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnag yang menjalin dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggungjawaban dan juga takaful (jaminan sosial).⁵

³ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Negara Pasal 1, Ayat 2.

⁴ Nurul Huda, et. Al. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 23

⁵Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) h. 62.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan alasan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensjahterakan masyarakat Indonesia. Dana desa merupakan dana yang cukup signifikansi bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis implementasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan menurut perspektif ekonomi islam.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini sesuai dengan keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta informasi lainnyayang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah di jangkau penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak mampu membiayai biaya kesehatan, status lemah dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Dari segi fisik kemiskinan identik dengan tempat tinggal di daerah pedesaan, pesisir pantai, bantaran sungai yang keruh, kotor dan rumah kumuh. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan seseorang gelap mata sehingga melakukan

beragam hal negatif untuk mencukupi kebutuhan, misalnya pelacuran, pencurian, penipuan, bunuh diri, dan banyak hal lain akibat dari kemiskinan yang membelenggu.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering kali tidak disadari, kehadirannya merupakan masalah bagi manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan

kehidupan dengan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.⁶

Kemiskinan dalam pandangan islam bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural dimana seseorang menjadi miskin karena prilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rizqi yang dijanjikan tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya dabbah, yang artinya harfiahnya adalah “yang bergerak”.⁷

Pandangan islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adanya upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak memperdulikan nasib kaum miskin, maka Al-Quran menyebut mereka sebagai para pendusta agama. Islam sudah jelas memberikan perintah kepada kita untuk membantu sesama atau membantu fakir miskin.

⁶Wildana wirgadinata, *Islam & Pengentasan kemiskinan*, (malang: UIN-MALANG PRESS,2011), h.13.

⁷Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan.....*, h.70

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 38:

فَاتِّبِطِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya : maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah ; dan mereka itulah orang-orang beruntung.*⁸

Ayat ini menerangkan bahwa lapang sempitnya rezeki merupakan ketentuan Allah dan sarana untuk menguji keimanan hamba-Nya, kemudian pada ayat ini Allah meminta kepada orang mukmin tidak hanya berinfak dan bersedekah, melainkan juga melakukan kebaikan apapun bentuknya kepada siapa saja, khususnya kaum kerabat. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat dengan menjaga hubungan silaturahmi, berbuat kebajikan, dan berkorban untuknya, juga kepada orang miskin dengan meringankan beban hidupnya dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah melalui usaha-usaha baiknya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Melalui pemberian dan pengorbanan, dalam lingkungan terbatas, kerabat akan tercukupi kebutuhannya, dan dalam lingkungan yang lebih luas, perbuatan itu akan melahirkan sikap tolong-menolong di antara muslim.⁹

Kemiskinan telah menjadi masalah yang sangat besar karena melibatkan berbagai aspek kehidupan, karena substansi kemiskinan merupakan suatu kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qurandan Terjemahannya* (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006) h. 408.

⁹Terjemahan Dan Tafsir (On-Line) Tersedia di: <https://www.indonesiaaquran.com> (23 Januari 2020) pukul 20.13

dasar yang berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan untuk mendapat alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan.¹⁰

Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberi perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategi dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun

¹⁰Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung; Alfabeta, 2007), h. 65.

2015 sesuai peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk memberikan pedoman yang lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan yang dimaksud adalah dana desa.¹¹

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa didalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹²

Data masyarakat miskin yang ada di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten tanggamus Sebanyak 187 kk dan data menunjukkan anggaran dana desa di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2016 jumlah dana desa adalah sebesar Rp. 1.000,871,541, Tahun 2017 sebesar Rp. 1.050,325,911, Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.130,517,768, dan kemudian pada tahun

¹¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, Pasal 72, Ayat 1.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2.

2019 sebesar Rp. 1.169,209,883,. Dana tersebut diprioritaskan untuk membangun desa.

Tentunya dengan dianggarkan dana desa tidak lain adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan mengentaskan masyarakat miskin dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar desa mampu menghidupi dirinya secara mandiri. Namun jika kita melihat secara langsung desa masih banyak mengalami kendala yang dihadapi dalam merealisasikan dana desa, seperti tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya, tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan sumber daya manusia yang belum siap untuk menerima dana desa.

Berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan lampung terdapat penyimpangan yang diduga dilakukan oleh kepala pekon sukapadang (Amir Hamzah) yang mengakibatkan kerugian negara Rp.508.428.473, kata Kopol Yuliansyah (wakapolres) didampingi kasatreskrim AKP Edi Qorinas, Jum'at (11/10/2019). Ia menjelaskan, dana yang diselewengkan dari anggaran dana desa Rp. 742 juta lebih. Selama ini kata yuliansyah, tersangka sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan memperkerjakan proyek susulan namun, ia tidak melakukannya.

Penyelewengan yang dilakukan tidak membayar siltap (penghasilan tetap) insentif aparat pekon dan guru PAUD serta staf sejak juli 2018. Bahkan sampai saat ini sebesar RP. 114,6 juta terang yuliansyah. Selanjutnya pekerjaan jalan rambat beton tiga ruas masing-masing panjang sekitar 500 meter, bangunan polindes, dan pekerjaan lainnya. Amir sendiri, kata yuliansyah sudah

ditahan sejak 8 oktober 2019 di polres tanggamus. Amir mengaku, dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.¹³

diharapkan dengan adanya dana desa ini kemiskinan yang ada di desa bisa dientaskan melalui program yang dibiayai dengan dana desa. Terutama program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat benar-benar sesuai dengan keinginan orang miskin yang ada di desa. berawal dari rasa keyakinan bahwa dana desa yang dianggarkan pemerintah untuk desa ini dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada, dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Analisis Implementasi Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balah Kabupaten Tanggamus**".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dana desa di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balah Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana implementasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balah Kabupaten Tanggamus dalam perspektif ekonomi Islam?

¹³.Tribun Lampung. Selengkan dana desa Rp 742 juta oknum kepala desa di tanggamus di tahan: koran online. (11 oktober 2019) pukul 23 januari 2020.

E. Tujuan Penelitian

Di dalam setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang mendasari mengapa penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana dana desa di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Taanggamus?
2. Mendeskripsikan bagaimana implementasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus?

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai upaya menjelaskan mengenai implementasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Taanggamus
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan sebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan ilmu sosial baik umum atau khusus bagi Prodi Pengembangan Masyarakat.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenisnya yaitu penelitian yang berkaitan dengan dana desa dan pengentasan kemiskinan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di desa sukapadang kecamatan cuku balak kabupatentanggamus.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa, serta dapat memberikan contoh bagi desa desa lain yang ada di Indonesia tentang bagaimanacara menggunakan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- c. Mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang dana desa dan pengentasan kemiskinan.

G. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, penulis perlu membuat batasan-batasan penelitian yaitu:

1. Objek penelitian hanya di lakukan pada desa sukapadang kecamatan cuku balak kabupaten tanggamus berdasrkan hal yang dibutuhkan oleh peneliti.
2. Data yang diperlukan sesuai dengan informasi dan narasumber terkait dan informasi dari studi literarur.
3. Metode analisis yang dilakukan dalam bentuk kualitatif berdasarkan penelitian lapangan dan library research.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dideskripsikan dengan kata-kata, sehingga digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi didesa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁴

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik pelaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁵ Sumber data yang di dapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data secara langsung dari masyarakat dan aparatur desa dan tokoh masyarakat di desa Sukapadang.

b. Data Sekunder

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara), 2015 h.44.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h, 22.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta di peroleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara cepat.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat yang ada di dalam Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten tanggamus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap lebih tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dianggap

¹⁷Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan KUantitatif, KUalitatif dan R&D), (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 117

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti. Yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah skeretaris desa, Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Ketua Urusan (KaUr) dan masyarakat Desa Sukapadang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal yang mengolah data dilokasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat keadaan masyarakat di desa sukapadang kecamatan cukuh balak kabupaten tanggamus.¹⁸

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat di desa sukapadang untuk mengetahui bagaimana implementasi dana desa

¹⁸V wirata Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015) h. 32.

dalam mengentaskan kemiskinan di desa sukapadang. Sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencarimaknya.

analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-hal yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode deskriptif yang peyelidikannya ditujukan pada masa sekarang atau permasalahan aktual dengan data mula-mula disusun kemudian diangkat.²⁰ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h 141.

²⁰ Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode Dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1982), h.200.

lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi, dokumen resmi, lembar foto dan lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Maka langkah berikutnya adalah mengadakan beberapa langkah untuk mengkategorikan data kedalam satuan-satuan yakni.²¹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengodean, penyederhanaan dari data yang dihasilkan ketika penelitian yang berlangsung di lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan penulis untuk memilih dan memilah data mana yang akan dipakai dan data mana yang akan dibuang. Tahap ini merupakan proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengorganisir data sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.²² Reduksi data ini penulis lakukan ketika proses transkrip wawancara, kemudian hasil wawancara penulis memilih hasil wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil wawancara yang dirasa tidak perlu dikutip maka penulis abaikan, hasil wawancara yang menurut penulis penting dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka penulis masukkan sebagai hasil.

b. Penyajian Data

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata

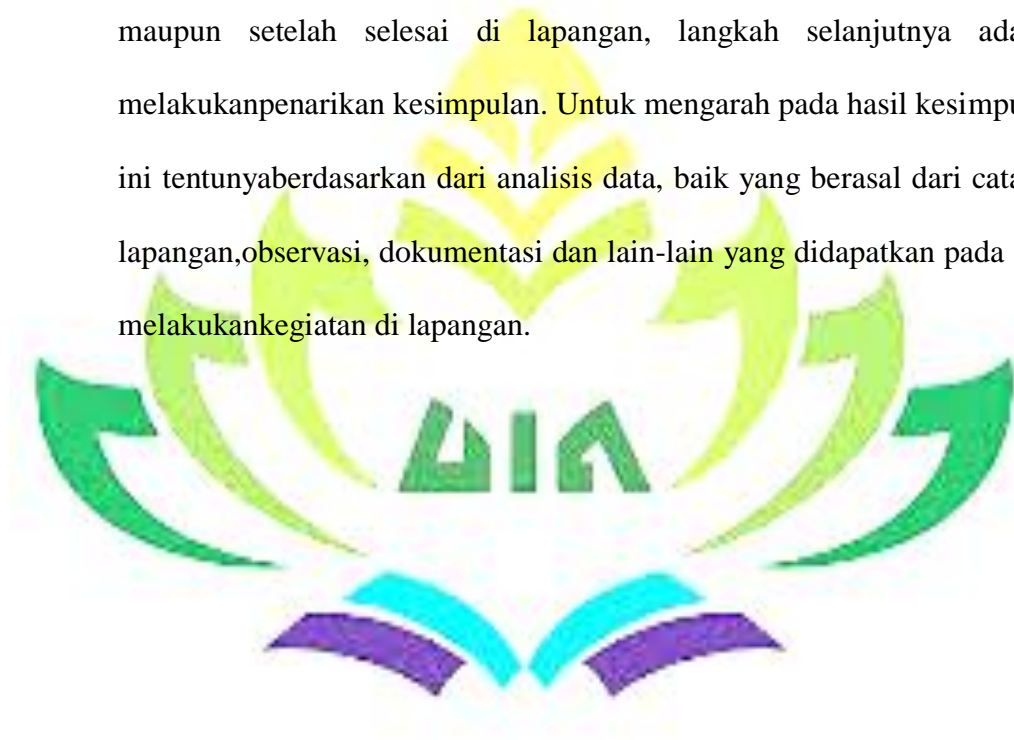
²¹Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.218

lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Kemudian tahap akhir dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan di lapangan.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidemisial yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan.²³ Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan (*proverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik, atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumberdaya pembangunan.

²³Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: YKTN, 2002), h. 112

Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang tidak saja dialami oleh negara berkembang namun dinegara majupun kemiskinan suatu masalah yang pelik untuk diselesaikan. Ada beberapa defenisi mengenai kemiskinan.²⁴

1. Bappenas mendefinisikan kemiskinan adalah dimana seorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
2. Menurut Sumitro Djojohadikusumo pola kemiskinan ada 4 yaitu, pertama adalah persistent proverty adalah kemiskinan yang kronis atau turun temurun, Kedua celicical proverty adalah yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, Ketiga seasional proverti adalah kemiskinan musuman yang menimpa nelayan dan petani, Keempat accidental proverti adalah akibat bencana sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan.²⁵
3. Al-Ghozali mendifiniskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.²⁶

Berdasarkan definisi-definisi diatas kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan karena kemiskinan mempunyai tolak ukur yang bukan hanya kekurangan dalam pangan.

²⁴Chalid, Nursiah dan Yusuf, Yusbar, PengaruhTingkat Kemiskianan, Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22 No. 2, Juni 2014

²⁵*Ibid*

²⁶Nurul Huda, et.al. *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),h.23

dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hokum sebagainya.²⁷

b. Penyebab kemiskinan

Menurut World Bank salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikatakan miskin (poor) adalah tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan tidak memadai.²⁸

Kuncoro dan Safi'i berpendapat penyebab kemiskinan bias dianalisis melalui dua aspek social dan ekonomi, Karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Adapun penyebabnya yaitu:²⁹

1. Rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah rasio antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja
2. Lemahnya akses masyarakat terhadap faktor produksi, lemahnya akses tersebut jika dijabarkan:

²⁷Novita Dewi, "Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau", *jom Fekon*, Vol. 4 No.1 (1 Februari 2017), h. 871.

²⁸*Ibid.* h. 871

²⁹Cristina Usmaliadani. "Analisi Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah sekor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi jawa Tengah Tahun 2007-2009", (Disertai Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang,2011), h. 34.

- a) Rendahnya modal usaha.
- b) Lemahnya masyarakat dalam mengakses pasar
- c) Sedikitnya kepemilikan asset.

Selain kemiskinan dipandang dari segi ekonomi, kemiskinan juga dapat dilihat dari akses social. Adapun hal tersebut dapat dijabarkan yaitu:

1. Rendahnya akses pendidikan pada negara terbelakang, pendidikan pada masyarakat terbelakang rendah sehingga produktifitasnya akan rendah dan mengakibatkan penghasilan menjadi rendah.
2. Rendahnya akses fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan dinegara terbelakang jauh lebih sedikit dan tertinggal oleh negara maju.

c. Karakteristik penyebab kemiskinan

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin:

1. Pendapatn masih rendah atau tidak berpendapatan apapun.
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan.
4. Tidak memiliki tempat tinggal
5. Tidak terpenuhinya standar gizi minimal.³⁰

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) karakteristik untuk menentukan rumah tangga miskin sebagai berikut:

- a) Luas bangunan per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah.

³⁰Tri Wahyuni Rejeki Ningsih, "identifikasi penyebab kemiskinan dikota semarang dari dimensi kultural", *jurnal Ekonomi Pemabngiunan*, Vol.72 No. 1, (juni 2011), h.34.

- b) Dinding rumah berupa bamboo/papan dengan kualitas rendah.
- c) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/besama-sama dengan rumah tangga lain sumber air minimum bukan air minum bersih.
- d) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik.
- e) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang.
- f) Hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari.
- g) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- h) Tidak memiliki kemampuan berobat ke puskesmas/ poliklinik.
- i) Lapangan pekerjaan berupa petani/nelayan atau pekebun.
- j) Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah.
- k) Jumlah penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan sebesar RP. 361.1990,- perkapita perbulan.

Jika minimal 9 (Sembilan) variabel terpenuhi maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.³¹

d. Indikator Kemiskinan

Menurut BPS, ada beberapa indikator kemiskinan:

a. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

³¹Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan*, (on-line) tersedia di: www.bps.go.id (januari 2020), pukul 22.46 wib

2. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi dipedesaan.

Rumus Perhitungan.³²

$$\mathbf{GK=GKM+GKNM}$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemsikinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

3. Presentase Penduduk Miskin

³²*Ibid*

Head Count Index (HCI-PO) adalah persentase penduduk yang berada di wilayah garis kemiskinan (GK).

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.³³

e. Macam-macam kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam-macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural.

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan

³³ *Ibid*

sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relative diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relative tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan structural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan social budaya ataupun social politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.³⁴

Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah kemiskinan Alamiah dan Kemeskinan Buatan.

a) Kemiskinan Alamiah

³⁴Elly M. Setiadi, *Usman Kolip, Pengantar sosiologi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 796

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumberdaya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal .

b) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan dinegara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembangian hasil-hasil pembangunan dimana sector industry misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja disektor pertanian.³⁵

f. Dampak Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan social yaitu kemiskinan. Dari satu permasalahan social saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan

³⁵Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 7 (2018)

social lainnya. Kemiskinan memeberikan dampak social yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran kesehatan tanggung, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilator belakanginya oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain maraknya tindakan kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan :

1. Banyaknya pengangguran.
2. Terciptanya prilaku kekerasan. Ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal ketika mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan
3. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
4. Susah mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.³⁶

³⁶Mubyanto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), h. 20

g. Solusi Terhadap Kemiskinan

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan:

1. Memperluas Lapangan Kerja

Cara ini yang cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian bertambah dari tahun ketahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi disetiap wilayah tertentu, dimana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.

2. Memberikan Bantuan Pendidikan secara Gratis

Pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar Sembilan tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu, pemerintah juga perlu memberikan keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja.

3. Memberikan Fasilitas yang Memadai dan Subsidi Gratis

Pemerintah sebaiknya membantu dalam memberi fasilitas yang merata disetiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau

masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

4. Melakukan Hal yang Inovatif dan Kreatif

Kegiatan ini dapat berupa hal-hal yang inovatif dan kreatif, seperti membuat kerajinan dari barang bekas. Hasil karya yang diperoleh dari kerajinan itu, dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Membuka Lapangan Kerja Sendiri

Dalam usaha mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Jika kita membuka usaha, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja berbagai penggerak jalan suatu usaha tersebut. Dengan cara inilah, pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya.³⁷

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Beberapa diantaranya yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.³⁸

2. Pengentasan kemiskinan

upaya meningkatkan efektivitas dalam penanggulan kemiskinan presiden telah mengeluarkan peraturan presiden(PERPRES) No.15 Tahun

³⁷Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan", *jurnal socius*", Vol, XIV, (Oktober- Desember, 2013)

³⁸Mohammad Mulyadi, " Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan dan Kesenjangan", *Jurnal Bidang Sosial*, Vol. X, No. 09, (2018).

2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) dibawah koordinasi wakil presiden republic Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut.³⁹

a) Klaster I

Kelaster 1 adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan social. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), beras untuk keluarga miskin (RASKIN), bantuan siswa miskin (BSM), dan program keluarga harapan (PKH).

b) Klaster II

Klaster II kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksud agar masyarakat luar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program Klaster II ini adalah PNPM

³⁹TNP2K, *Perogram Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di tnp2k.go.id/id/program/sekilas/, (28 Januari 2020) pukul 23:00 WIB.

mandiri, dan pada tahun 2014 PNPM mandiri telah resmi berakhir dan kemudian digantikan dengan program dana desa.

c) Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada Klaster III ini adalah kredit usaha rakyat.

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan diingkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan keberdayaan masyarakat.⁴⁰

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta

⁴⁰A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta, Media Pustaka, 2014) h. 4

penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai suyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamankan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁴¹

b. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁴² Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.⁴³ Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan social, subsidi, belanja lain-lain dan transfer kedaerah yang termasuk anggaran transfer kedaerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbang.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara, pada ayat pasal yang telah diamandemenkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 15 Ayat 2.

⁴²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁴³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

dipertimbangkan dan dirumuskan dalam mengalokasikan dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- 1) Alokasi dasar, dan
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.⁴⁴

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kemiskinan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

c. Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,

⁴⁴*Ibid*, h. 3

selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberian manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desamempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset local sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
 - a. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energy dan layanan dasar.
- 3) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil musyawarah desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDesa, rencana rencana kerja pemerintah desa

dan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa ditetapkan dalam peraturan desa.⁴⁵

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi
- d) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelastarian lingkungan hidup.

Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju atau mandiri.⁴⁶

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai

⁴⁵Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pengguna Dana Desa, Pasal 5 Ayat (1)

⁴⁶Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 6& 7 Ayat (1)

kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi:⁴⁷

- 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- 2) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 3) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat didesa (*community centre*).
- 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Puskesmas, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga media/ swamedikasi di desa.

⁴⁷Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang penetapan Prioritas Dana Desa, Pasal 8 Ayat (1)

- 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai masyarakat.
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 8) Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

d. Hubungan dana desa terhadap kemiskinan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam penelitian Handra Hefizal dkk, pada tahun 2017 yang meneliti pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa, tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.⁴⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan desa salah satunya adalah dana desa. Dengan semakin besarnya dana desa, diharapkan sarana dan prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar

⁴⁸Hefrizal, Hendra, et.al. "Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan" *Kompak*, Februari 2017, h. 14-15

terpenuhi potensi ekonomi lokal dapat di kembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan tertekan atau angka kemiskinan akan menurun.

4. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang alokasikan oleh pemerintah Kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana yang berimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.⁴⁹ Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa yang menunjang program-program desa. Dalam peraturan disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa secara profesional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa pada hakekatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retrebusi daerah kabupaten/kota

⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, ayat 9

dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima.

b. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa

Tujuan dari alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri yaitu untuk.⁵⁰

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembanguna di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatkan social.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Permendagri nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan deangan pengelolaan keuangan desa.

Rumus yang digunakan dalam alokasi dana desa adalah:

⁵⁰Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19

- 1) Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- 2) Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), berdasarkan presentase perbandingan antara azas merata adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.⁵¹

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dan desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya dipedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

⁵¹Lampiran Permendagri (on-line), tersedia di keuda.permendagri.go.id (25 februari 2020) pukul 20.13

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh bagian yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana dan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 5) Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.⁵²

Berdasarkan prinsip tersebut pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisah bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBdes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana

⁵²Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1)

desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana desa

Mekanisme pencairan dan penyaluran alokasi dana desa yaitu:

- 1) Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan
- 3) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah pertanggungjawaban baik secara administrative, secara teknis dan dasar hukum.
- 4) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- 5) Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri

denga Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

b) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang ditanda tangani oleh akepala desa.

c) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk.

d) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku harian umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.⁵³

d. Hubungan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam penelitian Prihartini Budi Astuti pada 2012, yang meneliti pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan, menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa . tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan

⁵³Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 3

pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, meningkatkan kententraman dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.

semakin besarnya alokasi dana desa, diharapkan jumlah kemiskinan akan tertekan sehingga angka kemiskinan akan menurun. Selain itu, pembangunan infrastruktur maupun social budaya perdesaan akan meningkat.

5. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok atas ketidak mampuan dalam memenuhi ekonomi, social dan politik dikehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan menurut pandangan islam merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (Al-hayah Al-Tayyibah).⁵⁴

Islam memandang kemiskinan menjadi tiga bagian, yaitu miskin iman, miskin ilmu, dan miskin harta.⁵⁵ Dalam hal ini penulis akan membahas miskin harta dalam pandangan islam. Islam memandang baik fakir maupun miskin sama-sama harus dibantu terlepas apaun definisinya secara Bahasa, fakir dalam perspektif islam

⁵⁴Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2015), h. 387

⁵⁵Al-arif, M Nour Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.

adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana seseorang sudah bekerja, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵⁶

Islam sangat memandang penting permasalahan kemiskinan ini karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman. Rosulallah SAW sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga beliau dalam pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan semua dana yang dimiliki kepada para mustahik sampai habis tanpa menyiksanya. Kebijakan anti kemiskinanpun turut dianut oleh para Khulafaur Rasyidin yang merupakan penerus perjuangan Rosulallah SAW, sehingga pengelolaan dan pendayagunaan zakat pada masa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan umat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan pembangunan negara.⁵⁷

Menurut Al-ghozali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan material dan kebutuhan rohani, pendapat tersebut dibuat oleh Ahmed, kemiskikinan bukan hanya perampasan barang dan jasa, tetapi kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan ahlak, keluarga dan juga masyarakat. Dengan demiksin kemiskinan mempunyai dampak

⁵⁶*Ibid*, h. 232

⁵⁷*Ibid*, h. 233

buruk terhadap masyarakat yang mengalami situasi tersebut. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah al Maa'uun ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya : “tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang mengahrdik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S Al-Maa'uun : 1-7)⁵⁸

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang lupa akan agama, lalai atas kewajibannya (sholat) dan tidak tolong menolong niscaya allah akan mencelakakan dan merekalah orang-orang yang termasuk dalam mendustakan agama. Tolong menolong dalam hal yang wajib bagi umat manusia seperti dalam nilai-nilai ekonomi islam dalam mengajarkan untuk saling tolong menolong dan allah menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia.⁵⁹

Allah sudah memerintahkan umat islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-ma'un. Dalam sisi Supply, allah mengajarkan muslim untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesabaran sebagai

⁵⁸Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) h. 602

⁵⁹Jaenal Efendi, “Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Disertai Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005), h. 44

benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Islam sebagai agama rahmat di alam ini pasti memberijawaban terhadap permasalahan kemiskinan tersebut. Salah satu pesan nyata yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁶⁰ (Q,Surah-An-nisa ayat 9)

Salah satu pesan moral yang disampaikan ayat ini adalah hendaklah orang-orang yang hidup saat ini berfikir dan merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah, makna lemah disini bukan hanya dari sisi kecukupan ekonominya saja, namun lebih dari itu, lemahnya intelektual, lemahnya jiwa social serta lemahnya keimanan terhadap nilai-nilai agama merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang hidup saat ini. Semua ini bertujuan agar terciptanya generasi yang memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap peradaban umat yang lebih baik.

Rezeki yang berbeda diberikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan social

⁶⁰Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006) h. 62

jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rezeki yang berbeda jika dilihat dari segi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan social dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.

a. Faktor penyebab Kemiskinan

Dalam Perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural. *pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. *Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidak pedulian dan kebakhilan kelompok kaya, sehingga miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. *Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, borokrasi, dan ekonomi di suatu tangan. *Kelima*, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.⁶¹

b. Indikator kemiskinan

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks, ada beberapa indikator kemiskinan antara lain:

- 1) Tingkat konsumsi Beras. Indikator ini menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan.

⁶¹Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma kemiskinan dalam Perspektif Islam Dan Konvensional". *Jurnal of Islam Economics and Business*", Vol. 1, No. 1, (Januari-juni, 2018)

- 2) Tingkat Pendapatan. Terdapat batas pendapat yang mengkatagorikan garis batas kemiskinan.
- 3) Kesejahteraan rakyat. Terdapat 9 komponen kesejahteraan rakyat yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan social, sandang, rekreasi, kebebasan.⁶²

c. Dampak kemiskinan

Banyak hadis Rasulullah SAW. Memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan keimanan, akhlak dan prilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa.

Yusuf Qarhawi menyebutkan dampak kemiskinan sebagi berikut:

- 1) Kemiskinan bahaya bagi akidah. Beliau mengatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi penyebab utama keraguan seseorang akan kebijakan aturan Allah SWT, kemiskinan banyak menyebabkan seseorang itu menjadi fakir, sehingga tidak heran jika nabi selalu berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kekafiran.⁶³
- 2) Kemiskinan berbahaya bagi Akhlak dan Prilaku. Kemiskinan itu banyak mendorong pada prilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena itu banyak orang berkata, “bunyi perut itu lebih dahsyat dari pada bunyi hati”.⁶⁴

⁶²*Ibid*

⁶³Yusuf Qardhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 12

⁶⁴*Ibid.*, h. 14

- 3) Kemiskinan Berbahaya pada Pikiran. Kemiskinan juga berbahaya pada pikiran seseorang, sebagaimana diriwayatkan pada Imam Abu Hanifah, berkata: “ jangan minta keputusan kepada orang yang tidak berfikir teliti dirumahnya.” Maksudnya karena orang yang bersangkutan kacau pikirannya, sehingga keputusannya tidak benar. Yang demikian ini karena emosi yang tempramen itu berpengaruh pada kelurusan berpikir dan berpendapat sebagaimana menurut ilmu jiwa.⁶⁵
- 4) Kemiskinan Berbahaya Bagi Keluarga. Kemiskinan juga berbahaya bagi keluarga, antara lain: bagi pembentukannya, kebutuhannya, ketentramannya, karena itu Al-Qur'an berpesan agar para bujangan miskin ini tetap menjaga kesucian diri mereka dan bersabar hingga sampai pada kemampuan ekonomi. Kemiskinan sendiri banyak menyebabkan perceraian, mengganggu keharmonisan bahkan merobek-robek tali kasih.⁶⁶
- 5) Kemiskinan Berbahaya bagi Ketentraman Masyarakat. Kemiskinan juga berbahaya bagi kedamaian dan ketentraman masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga menimbulkan bahaya-bahaya lain terhadap kesehatan umum seperti gizi buruk, tempat tinggal yang tidak layak dan lain-lain. Juga terhadap kesehatan jiwa karena suka dibarengi

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid.*, h. 16

kegaduhan, kecemasan, dan kebencian. Dalam keadaan seperti itu juga berbahaya terhadap produktivitas, perekonomian dan lain-lain.⁶⁷

d. Solusi Terhadap Kemiskinan

Islam telah menyatakan perang terhadap kemiskinan sebagaimana yang diatur oleh Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan menyerangnya secara habis-habisan untuk menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak dan perilaku. Serta untuk melindungi keluarga dan masyarakat, menjaga ketentraman dan keutuhan serta menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar sesama muslim. Untuk menghindari itu semua, Islam menawarkan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Bekerja (al-‘amal)

Bekerja adalah cara dan senjata pertama dan utama dalam memerangi kemiskinan, bekerja juga dapat dikatakan sebagai upaya pertama dalam memperoleh kekayaan, serta sebagai unsur pertama dalam memakmurkan dunia yang dititipkan oleh Allah dan diperintahkan pula untuk memakmurkannya.

2. Jaminan Hidup dari Kerabat yang Mampu

Meskipun senjata yang paling ampuh dalam memerangi kemiskinan adalah usaha dari diri sendiri dengan cara bekerja, namun jaminan kerabat dekat yang kekurangan merupakan hal yang tidak kalah

⁶⁷*Ibid.*, h. 18-19

pokok dalam islam bagi mereka yang tidak mampu untuk bekerja lagi.

3. Zakat

Islam tidak melupakan mereka yang tidak tergolong fakir dan miskin. Allah SWT. Telah menetapkan hak-hak orang fakir dan miskin dalam harta orang-orang yang terlembaga dalam bentuk zakat. Tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang fakir dan miskin. Masyarakat fakir dan miskin adalah sasaran pertama adri pengeluaran zakat.

4. Jaminan kas Islam (Baitul Mal)

Negara islam sebenarnya mempunyai kekayaan sebagai hak milik umum, yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan umum, baik dikelola sendiri, disewakan, atau dikelola bersama pihak lain. Pada dasarnya seluruh pemasukan terhadap kas islam merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat fakir dan miskin. Ketika perolehan dari zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan.⁶⁸

6. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi islam. Bebrapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi islam.

⁶⁸Shiddiq Ahyani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Solusinya Dalam Pandangan Islam (studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan kemiskinan), *Jurnal Kriman*, Vol. 04, No, 01, (2016)

Adapun definisi-definisi tersebut antara lain:

- 1) Monzer kafh (1995) mendefinisikan ekonomi islam sendiri dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pradigma islam yang bersumber merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Muhammad Abdul Mannan (1997) mendefisikan sebagai ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.
- 3) Metwally (1995) menurutnya ekonomi islam dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, ijma, dan qiyas.
- 4) Umar Chapra (1981) mengartikan ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan muqqshid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan moral masyarakat.
- 5) M. Nejatullah Sidiqqi (1985) mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi

pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah akal dan pengalaman.⁶⁹

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (QS. Al-Baqarah: 30)*⁷⁰

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumberdaya alam yang ada, jadi ekonomi islam yaitu ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

b. Dasar Hukum Ekonomi

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Qur'an juga memberi hukum- hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi islam itu sendiri. Al-Qur'an sumber hokum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan kesetabilan perekonomian itu sendiri.⁷¹

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

⁶⁹Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Mikro Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

⁷⁰Departemen Kementrian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah pustaka, 2006), h. 5

⁷¹Hukum Ekonomi Islam, (ON-Line) Tersedia di: <http://Islam.Cendikian.com> /2014/02/hokum-ekonomi-islam-dalam-sumber-hukum-Al-Qur'an. (7 februari 2020) Pukul 22.26

Artinya: barangsiapa yang mentaati rosul itu, sesungguhnya iya telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. An-Nisa:80)⁷²

Ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al_Qur'an, Al_Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum islam, seperti memerintahkan pada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan hal-halnya jual beli beserta haramnya riba.

c. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam merupakan sitem ekonomi yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada suatu kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi islam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.⁷³

setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah ekonomi tersebut, ini sangat di perlukan karena satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al_Qur'an surat Al-Maidah ayat 8

⁷²Departemen Kementrian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah pustaka, 2006), h. 91

⁷³Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Belaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah:8)⁷⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa islam memberi penjelasan tentang keadilan dalam segala hal karena adil lebih dekat dari takwa.

d. Nilai-Nilai dalam Sistem Ekonomi Islam

Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujuan dalam sistem ekonomi islam bersumber dari Al_Qur'an dan Sunnah, yang mempunyai dasar dari pandangan hidup islam. Selalu di pegang, dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat.

Besumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:⁷⁵

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- 2) Tanggung jawab atau amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar,

⁷⁴Departemen Kementrian Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah pustaka, 2006), h. 108

⁷⁵Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2013), h. 62

amanah dalam mewujudkan kemasalahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu.

3) Takafakul (jaminan jawab social), adanya tanggung jawab social dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

e. Prinsi dan Tujuan Ekonomi Islam

Prinsip dan tujuan ekonomi islam, juga bersmber pada ajaran syar'I yang dikembangkan dan di jabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendikiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang di tanamkan sitem ekonomi islam yang meliputi:⁷⁶

1) Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah aktivitas ekonomiyang dilakukan hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi pengakuan terhhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab.

2) Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah dimuka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tujuan syar'i berekonomi semata-mata untuk kemasalahatan umat, dan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini

⁷⁶*Ibid*, h. 65

mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan kepentingan pribadi sekalipun.

Selain 2 prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun angka ekonomi islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas.

Sistem ekonomi islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya syari'ah. Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan.

Tujuan syar'i akan menjiwai manusia akan bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Keimanan terlepas pada aturan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang terhadap yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seorang. Seperti misalnya: prilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Sikap mental tersebut secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas dan kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.⁷⁷

Menurut Abdul Mannan landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep Fundamental, yaitu keimanan kepada Allah SWT

⁷⁷*Ibid*, h. 67

(tauhid). Kepemimpinan (khalifah). Dan keadilan (a'dalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar. Sebab konsep-konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (abudillah) mahdah (berkat sholat, dzikir, dan sebagainya), termasuk ekonomi (mu'amalah), musyawarah, hingga akhlak.⁷⁸

Ekonomi yaitu bagian dari mu'amalah secara umum dalam konsep islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah dan keadilan (a'dalah) yang harus berdampak mana kala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera Al-falah.⁷⁹

Ekonomi islam memandang bahwa keberadaan manusia dan sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan tuhan tentunya akan melahirkan tanggung jawab untuk apa yang dilakukan dalam menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang terbatas sehingga diharapkan mendapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada permasalahan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.⁸⁰

Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan penting yang dihadapi suatu sistem ekonomi.

Tidak terkecuali masalah dana desa yang merupakan salah satu sarana

⁷⁸Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Airlangga, 2012), h. 4

⁷⁹*Ibid*, h. 6

⁸⁰Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2013), h. 53

kebijakan ekonomi yang bertujaun untuk menciptakan keadilan dalam anggaran untuk desa, sehingga tercipta keadilan di masyarakat secara luas.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada pembahasan yang cukup signifikan, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu dibawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah di tulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. Rasmah Hasman dengan judul kajian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten sigi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data primer dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dikecamatan kinovaro kabupaten sigi berjalan kurang baik. Karena, dimensi komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan alokasi dana desa dikecamatan kinovaro kabupaten sigi, kurang dilaksanakan oleh kecamatan dan desa. Dimensi sumber daya yang kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana

dan prasarana. Dimensi struktur organisasi kurang baik, karena penyusunan program pembangunan dan di biyai ADD disusun oleh pihak kecamatan bukan desa.⁸¹

2. Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwintara dengan judul “Pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan paraf hidup masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa” dalam penelitiannya peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan derajat kehidupan dapat terakomodasi melalui kebijakan dana desa. Oleh karena itu dana desa. Oleh karena itu, dana desa tetap digulirkan hingga desa benar-benar menjadi wilayah yang mandiri, masyarakatnya berpendidikan dan sejahtera serta mampu mengangkat wajah desa menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya pembangunan masyarakat, maka masyarakat desa juga mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mandiri dimana dengan kondisi masa lalu yang lekat dengan kemiskinan menyebabkan jati diri masyarakat desa juga ikut tergerus dengan label kemiskinannya.⁸²

3. Intan Mala Sari dan m. Faisal Abdullah dengan judul “ Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung” dalam penelitiannya untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulung agung tahun

⁸¹Ramsah Hasman, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten sigi”, Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 11 (November 2015) h. 107-117

⁸²Rumsari hadi sumarto dan Lukas dwintara “pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan taraf hidup mayarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa: journal PUBLICUHO, Vol.2 No.2 July 2019.

2015,2016 maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa dana desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di kabupaten tulungagung. Sedangkan sisanya sebanyak 114 desa, dana desa tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan desa, hal tersebut dikarenakan penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasaran fisik perdesaan 84% sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5%, selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimalnya kemampuan teknis pengelolaan, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya.⁸³

4. Feiby Vencentia Dkk Tangkumahat dengan judul Kajian Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. Penelitian ini dilakukan pada tujuh desa penerima dana desa dikecamatan pineleng, Kabupaten minahasa ProvinsinSulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data Primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat desa dikecamatan pineleng. Setiap desa diambil 10 oarang responden untuk setiap desa jadi total jumlah anggota masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 orang responden.

⁸³Intan Mala Sari dan M.Faisal Abdullah, "Analisi Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung".Jurnal ekonomi pembangunan Vol.15,No.01 juni 2017

Hasil penelitian ini menunjukkan program dana desa di kecamatan pineleng berjalan cukup baik, namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kepastian kapasitas dan skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik.⁸⁴

Setelah menelaah penelitian terdahulu dengan penelitian ini, tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dikarenakan pembahasan dalam penelitian ini kurang lebih menelaah dampak, peran dan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan ekonomi. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu adanya perspektif ekonomi islam dan beberapa variabel yang berbeda.

C. Kerangka Pikir

perhatikan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data yang akan diteliti guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu maka penulis akan menguraikan landasan berpikir penelitian yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

⁸⁴Feiby Vencentia Tangkumahat, "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas", Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 13 No. 2A (juni 2017), h. 335-342

Dana desa merupakan suatu kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan yang ada di desa sukpadang kecamatan cuku balak kabupaten tanggamus . Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :

